



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**

**LAPORAN KINERJA
PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA BARAT
TRIWULAN I TAHUN 2023**

NOMOR : OT.04/LPP- 180 /PW10/6/INT/2023

TANGGAL : 17 April 2023



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**

Jalan Raya Cibeureum Nomor 50 Bandung 40184
Telepon (022) 6015108 *Faksimile* (022) 6032096
e-mail : jabar@bpkp.go.id

Nomor : OT.04/LPP-180/PW10/6/INT/2023
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Kinerja Perwakilan BPKP
Provinsi Jawa Barat s.d Triwulan I
Tahun 2023

17 April 2023

Yth.

Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Tata Kelola
di Jakarta

Berikut kami sampaikan Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat s.d
Triwulan I Tahun 2023.

1. Pencapaian Target *Outcome* sesuai Perjanjian Kinerja

Realisasi kinerja s.d Triwulan I Tahun 2023 berdasarkan sasaran kegiatan dalam
menjalankan fungsi utamanya diuraikan dibawah ini:

**Sasaran Kegiatan I: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas
Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah**

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target 2023	Realisasi TW I 2023	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.1	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	3.349	-	-
1.2	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (Juta)	137.919	198.541	143,95
1.3	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Juta)	113.184	1.978	1,75

1.1.1. Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi

Belum ada realisasi Nilai optimalisasi penerimaan daerah

1.1.2. Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah

Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah sebesar Rp198.540.866.400,00
diperoleh dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang IPP 2 berupa kegiatan
Evaluasi atas Akuntabilitas Pengelolaan anggaran Pemilu dan Pemilihan Tahun

2023 dan 2024 pada Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bandung, dan Evaluasi atas Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu dan Pemilihan Tahun 2023 dan 2024 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bandung dan Bidang APD berupa kegiatan Evaluasi Program Gerakan Membangun Desa dalam rangka Pembangunan Desa yang Mandiri di Wilayah Provinsi Jawa Barat yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan rincian sebagai berikut:

No	Bidang Pengawasan	Realisasi (Rp)
1	IPP 2	164.526.866.400,00
2	APD	34.014.000.000,00
	Jumlah	198.540.866.400,00

1.1.3. Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah

Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah sebesar Rp1.977.477.143,00 diperoleh dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang IPP 1 berupa kegiatan Audit Tujuan Tertentu atas Pekerjaan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir Bandang Sungai DAS Cimanuk Kabupaten Garut Tahun 2022, Bidang IPP 2 berupa kegiatan Evaluasi Pengelolaan BOS Tahun Anggaran 2022-2023 Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Tasikmalaya, Evaluasi atas Pengelolaan Dana BOS Reguler Tahun 2022 dan 2023 Jenjang SMA dan SMK Provinsi Jawa Barat Uji Petik pada Kota Cirebon dan Evaluasi atas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah pada Kota Cirebon Tahun 2022-2023 dan Bidang Investigasi berupa kegiatan PKKN atas Kasus TPK Pengadaan Budidaya Domba di Kota Bekasi Tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:

No	Bidang Pengawasan	Realisasi (Rp)
1	IPP 1	103.977.913,00
2	IPP 2	754.509.230,00
3	Investigasi	1.118.990.000,00
	Jumlah	1.977.477.143,00

Sasaran Kegiatan II: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target 2023	Realisasi TW I 2023	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
2.1	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persen	85,00	85,00	100
2.2	Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi	Kegiatan Prioritas Daerah	2	1	50

2.2.1. Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan

Capaian persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan mencapai 100% yang dilakukan oleh Bidang Investigasi yang berasal dari penugasan identifikasi dan pengembangan informasi awal atas resiko dan permasalahan terhadap evaluasi hambatan kelancaran pembangunan lintas sektoral reforma agraria.

2.2.1. Jumlah kegiatan pembangunan prioritas daerah yang diawasi

Target jumlah kegiatan pembangunan prioritas daerah yang diawasi sebanyak 2 kegiatan yang merupakan kegiatan prioritas daerah atas hasil pengawasan APPD baru dilaksanakan 1 kegiatan yaitu Evaluasi program gerakan membangun desa yang mandiri di wilayah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sasaran Kegiatan III: Meningkatnya Kesadaran Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan pada K/L/D/BU yang Menjadi Tanggung Jawab Perwakilan BPKP

Belum ada realisasi untuk persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti di Triwulan I tahun 2023.

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target 2023	Realisasi TW I 2023
1	2	3	4	5
3.1	Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti	Persen	80,00	-

Sasaran Kegiatan IV: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha

Belum ada realisasi untuk sasaran kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha di Triwulan I tahun 2023

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target 2023	Realisasi TW I 2023
1	2	3	4	5
3.1	Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti	Persen	80,00	-
4.1	Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMD	1,00	-
4.2	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	24,00	-
4.3	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	7,00	-
4.4	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	220,00	-
4.5	Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUMDes	5,00	-

Sasaran Kegiatan V: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target 2023	Realisasi TW I 2023	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
5.1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100
5.2	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen	85,00	85,00	100
5.3	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Pemda	6	0	0
5.4	Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Badan Usaha	2	0	0

5.5.1. Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti

Realisasi persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti telah tercapai sebesar 100% diperoleh dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Investigasi yang berasal dari kegiatan Audit Penghitungan Kerugian

Kuangan Negara atas kasus Tindak Pidana Kasus Pengadaan Budidaya Domba di Kota Bekasi Tahun 2021.

5.5.2. Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti

Capain kinerja hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti sebesar 100% diperoleh dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Investigasi yang berasal dari kegiatan Fraud Risk Assesment atas perencanaan dan penganggaran pada Bawaslu Provinsi Jawa Barat; penilaian risiko kepatuhan, kinerja, korupsi dan hambatan kelancaran pembangunan (K3HKP) Program P3DN pada Perumda Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung.

Adapun untuk indikator kinerja jumlah pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik dan jumlah badan usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik belum dilaksanakan di Triwulan I Tahun 2023.

Sasaran Kegiatan VI: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target 2023	Realisasi TW I 2023	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
6.1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Provinsi	1	1	100
6.2	Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Kab/Kota	22	10	45,45
6.3	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Provinsi	1	1	100
6.4	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Kab/Kota	25	20	80
6.5	Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3	Kab/Kota	5	5	100
6.6	Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja	Pemda	23	-	0
6.7	Jumlah desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	25	-	0
6.8	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	25	-	0
6.9	Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3	BUMD	4	-	0
6.10	Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3	BLUD	4	-	0

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target 2023	Realisasi TW I 2023	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
6.11	Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	BUMD	3	-	0
6.12	Jumlah BLUD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	BLUD	1	-	0

6.6.1. Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3

Capaian Kinerja Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 telah mencapai 100%.

6.6.2. Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3

Realisasi Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 sebanyak 10 Pemda yakni: Kabupaten Bogor, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kota Cirebon, Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Banjar dan Kota Bekasi.

6.6.3. Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3

Capaian Kinerja Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 telah mencapai 100%

6.6.4. Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3

Realisasi Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 sebanyak 20 Pemda yakni: Kabupaten Bandung, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cirebon, Kota Depok, Kota Sukabumi dan Kota Tasikmalaya.

6.6.5. Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3

Realisasi Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3 sebanyak 5 Pemda, yakni: Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sukabumi dan Kota Cirebon.

Adapun untuk 7 indikator kinerja lainnya yakni Dari Indikator Kinerja Jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja, Jumlah desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel, Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai, Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3, Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3, Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3 dan Jumlah BLUD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3 belum ada realisasi s.d Triwulan I Tahun 2023.

Sasaran Kegiatan VII: Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target 2023	Realisasi TW I 2023	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
7.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75,00	-	0
7.2	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82,00	-	0
7.3	Persentase efektivitas pengendalian intern Unit Kerja (SPIP Unit kerja)	(%) Persen	70,00	-	0
7.4	Persentase penyelesaian RTP (MR Unit kerja)	(%) Persen	100,00	-	0
7.5	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	75,00	-	0
7.6	Skor IKPA Unit Kerja	Indeks Skala 100	95,00	96,75	101,84
7.7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala 100	80,00	-	0

Dari tujuh indicator kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja s.d Triwulan I Tahun 2023 baru terealisasi 1 indikator yaitu Indikator Kinerja Skor IKPA Unit Kerja.

Rincian selengkapnya target dan realisasi kinerja sasaran s.d Triwulan I Tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran 1

2. Pencapaian Target Sintesa Hasil Pengawasan (SHP)

Sesuai RKA-KL revisi ke 2 tanggal 10 Maret 2023, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat ditargetkan untuk menghasilkan Sintesa Hasil Pengawasan (SHP) sebanyak 110 SHP yang disusun berdasarkan topic pengawasan.

Realisasi SHP pengawasan s.d. bulan Maret 2023 berdasarkan SIMA Executive sebanyak 15 SHP (15%).

Rincian rencana dan realisasi *output* pengawasan s.d. bulan Maret 2023 disajikan pada Lampiran 2.

3. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pengawasan (PKPT)

a. PKPT Awal sesuai SIMA

Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) Program Kinerja Penugasan Tahunan (PKPT) awal di s.d. bulan Maret 2023 sebanyak 245 PP atau 146,71% dari Rencana Mulai Penugasan (RMP) sebanyak 167 PP.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. bulan Maret 2023 sebanyak 119 laporan yakni 94,44% dari Rencana Penerbitan Laporan (RPL) sebanyak 126 laporan atau 48,57% dari PP yang telah terbit Surat Tugasnya sebanyak 245 PP.

Realisasi PP s.d. bulan Maret 2023 yang telah di-entry ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 220 PP atau 89,80% dari jumlah PP yang telah terbit ST-nya sebanyak 245 PP. Sedangkan realisasi laporan yang telah di-entry sebanyak 16 laporan atau 13,45% dari jumlah laporan terbit sebanyak 119 laporan.

Atas hal tersebut Kami telah menyarankan kepada para korwas menginstruksikan kepada ketua tim untuk menginput laporan tepat waktu, dan para dalnis dan korwas untuk melakukan reviu berjenjang atas laporan yang diinput oleh ketua tim dalam aplikasi SIMA.

b. PKPT Anggaran Belanja Tambahan (ABT)

Belum ada realisasi atas penugasan PKPT ABT.

c. Kerangka Acuan Pengawasan (KAP) Generik

Belum ada realisasi penugasan yang berasal dari KAP Generik

Rincian pelaksanaan laporan kinerja Triwulan I Tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) disajikan pada Lampiran 2a, sedangkan pelaksanaan laporan kinerja Triwulan I Tahun 2023 berdasarkan Bidang Pengawasan disajikan dalam Lampiran 3b.

4. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pendukung Pengawasan (PKAU)

Realisasi penugasan Program Kerja Administrasi Umum (PKAU) s.d bulan Maret 2023 sebanyak 15 PP atau 115,38% dari rencana sebanyak 13 PP.

Realisasi penerbitan laporan/dokumen dukungan pengawasan s.d. bulan Maret 2023 sebanyak 8 laporan/dokumen atau 266,67% dari rencana sebanyak 3 laporan/dokumen.

Rincian pelaksanaan RKT Dukungan Pengawasan s.d. bulan Maret 2023 disajikan pada Lampiran 4.

5. Penggunaan Hari Produktif

Realisasi penggunaan hari pengawasan s.d. bulan Maret 2023 sebanyak 9.829 OH atau 22,54% dari rencana hari pengawasan satu tahun (Tahun 2023) sebanyak 43.608 OH.

Realisasi penggunaan hari produktif (pengawasan dan non pengawasan) per pegawai s.d. bulan Maret 2023 sebanyak 68 OH dan 28,69% dari potensi setahun sebanyak 237 OH.

Realisasi penggunaan hari produktif s.d. bulan Maret 2023 disajikan pada Lampiran 5.

6. Penyerapan Anggaran

Berdasarkan data dari Sub Bagian Keuangan, realisasi anggaran s.d bulan Maret 2023 sebesar Rp8.553.487.093,00 atau 102,09% dari rencana s.d Bulan Maret 2023 sebesar Rp8.378.765.000,00.

Rencana dan realisasi anggaran s.d bulan Maret 2023 disajikan pada Lampiran 6.

Demikian Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023 kami sampaikan.

Atas perhatian dan perkenannya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Samono

PERWAKILAN BPKP JAWA BARAT
TARGET DAN REALISASI OUTCOME SESUAI PERJANJIAN KINERJA
REALISASI S.D TRIWULAN I TAHUN 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target 2023	Realisasi TW I 2023	Capaian (%)
1	2	3	4	5	
1 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1.1 Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	3.349,00	-	-
	1.2 Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (Juta)	137.919,00	198.541,00	-
	1.3 Nilai penyelamatan keuangan negara dan Daerah	Rupiah (Juta)	113.184,00	1.977,90	1,75
2 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	2.1 Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	(%) Persen	85,00	85,00	100,00
	2.2 Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi	Kegiatan Prioritas Daerah	2,00	1,00	50,00
3 Meningkatkan Kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP	3.1 Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti	(%) Persen	80,00	-	-
4 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	4.1 Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMD	1,00	-	-
	4.2 Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	24,00	-	-
	4.3 Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	7,00	-	-
	4.4 Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	220,00	-	-
	4.5 Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUMDes	5,00	-	-
5 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	5.1 Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	(%) Persen	100,00	100	-
	5.2 Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang	(%) Persen	85,00	85	-
	5.3 Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi	Pemda	6,00	0	-
	5.4 Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Badan Usaha	2,00	0	-
6 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	6.1 Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Provinsi	1,00	1,00	100,00
	6.2 Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Kabupaten/Kota	22,00	10,00	45,45
	6.3 Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Provinsi	1,00	1,00	100,00
	6.4 Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Kabupaten/Kota	25,00	20,00	80,00
	6.5 Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3	Kabupaten/Kota	5,00	5,00	100,00
	6.6 Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja	Pemda	23,00	-	-
	6.7 Jumlah desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	25,00	-	-
	6.8 Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	25,00	-	-
	6.9 Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3	BUMD	4,00	-	-
	6.10 Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3	BLUD	4,00	-	-
	6.11 Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	BUMD	3,00	-	-
	6.12 Jumlah BLUD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	BLUD	1,00	-	-
7 Meningkatkan Tata Kelola Unit Kerja	7.1 Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75,00	-	-
	7.2 Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82,00	-	-
	7.3 Persentase efektivitas pengendalian intern Unit Kerja (SPIP Unit kerja)	(%) Persen	70,00	-	-
	7.4 Persentase penyelesaian RTP (MR Unit kerja)	(%) Persen	100,00	-	-
	7.5 Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	75,00	-	-
	7.6 Skor IKPA Unit Kerja	Indeks Skala 100	95,00	96,75	-
	7.7 Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala 100	80,00	-	-

**Target dan Realisasi Sintesa Hasil Pengawasan Pengawasan
s.d. Bulan Maret 2023**

No.	Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target sesuai Perkin/RKA Terakhir		Realisasi s.d. Bulan ini			Capaian (%)	
				Tahun 2023	s.d. Bulan ini	Perkin/RKA Terakhir	Tambahan	Total	Tahun 2023	s.d. Bulan ini
1		2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=8/4x100	10=8/5x100
1	FAG.711	Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut	Laporan	2	0	0	0	0	0,00	0,00
		Bidang P3A	Laporan		0	0	0	0		
2	FAG.U11	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah dan Desa	Laporan	5	3	3	0	3	60,00	0,00
		Bidang IPP1	Laporan		0	0	0			
		Bidang APD	Laporan		3	3	0			
		Bidang Inv	Laporan		0	0	0			
3	FAG.U31	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD	Laporan	5	0	0	0	0	0,00	0,00
		Bidang AN	Laporan		0	0	0			
4	FAG.028	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	Laporan	29	5	5	0	5	17,24	0,00
		Bidang IPP1	Laporan		0	0	0			
		Bidang IPP2	Laporan		3	3	0			
		Bidang APD	Laporan		2	2	0			
		Bidang AN	Laporan		0	0	0			
		Bidang Inv	Laporan		0	0	0			
		Bidang P3A	Laporan		0	0	0			
5	UAG.U21	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia	Laporan	9	0	1	0	1	11,11	0,00
		Bidang IPP1	Laporan		0	0	0			
		Bidang IPP2	Laporan		0	0	0			
		Bidang APD	Laporan		0	1	0			
		Bidang AN	Laporan		0	0	0			
6	UAG.U22	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Infrastruktur dan Konektivitas	Laporan	8	1	1	0	1	12,50	0,00
		Bidang IPP1	Laporan		1	1	0			
		Bidang IPP2	Laporan		0	0	0			
		Bidang APD	Laporan		0	0	0			
		Bidang AN	Laporan		0	0	0			
7	UAG.U23	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Ekonomi	Laporan	6	5	5	0	5	83,33	0,00
		Bidang IPP2	Laporan		5	5	0			
		Bidang APD	Laporan		0	0	0			
		Bidang AN	Laporan		0	0	0			
		Bidang Inv	Laporan		0	0	0			
8	UAG.U24	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	Laporan	8	0	0	0	0	0,00	0,00
		Bidang IPP1	Laporan		0	0	0			
		Bidang Inv	Laporan		0	0	0			
9	UAG.U27	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Daerah	Laporan	2	0	0	0	0	0,00	0,00
		Bidang APD	Laporan		0	0	0			
10	UAG.U41	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Kecurangan	Laporan	2	0	0	0	0	0,00	0,00
		Bidang Inv	Laporan		0	0	0			
11	UAG.U52	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	Laporan	30	0	0	0	0	0,00	0,00
		Bidang APD	Laporan		0	0	0			
		Bidang P3A	Laporan		0	0	0			
12	UAG.U53	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	Laporan	4	0	0	0	0	0,00	0,00
		Bidang AN	Laporan		0	0	0			
		Jumlah		110	14	15	0	15	13,64	0,00

**Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit
Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan
s.d. Bulan Maret 2023**

No.	Output	Penugasan Pengawasan (PP)								Laporan Hasil Pengawasan								% Realisasi Laporan dibandingkan Realisasi PP
		Rencana			Realisasi s.d. Bulan ini	Capaian (%)		Input dalam SIMA		Rencana		Realisasi s.d. Bulan ini	Capaian (%)		Input dalam SIMA			
		Tahun 2023		s.d. Bulan ini		Tahun 2023	s.d. Bulan ini	Jumlah ST telah Diinput dalam SIMA	% ST yg Diinput dalam SIMA	Tahun 2023	s.d. Bulan ini		Tahun 2023	s.d. Bulan ini	Jumlah Lap Diinput dalam SIMA	% Lap yg Diinput dalam SIMA		
		PKPT	ST															
1	2	3		4	5	6=5/3*100	7=5/4*100	8	9=8/5*100	10	11	12	13=10/8*100	14=10/9*100	15	16=15/12*100	17=12/5*100	
A	PKPT																	
2	PKPT ABT																	
	NIHIL																	
	Sub Jumlah 2	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
	Jumlah A	132	245	167	245	185,61	146,71	220	89,80	245	126	119	48,57	94,44	16	13,45	48,57	
B	KAP Generik																	
	NIHIL																	
	Sub Jumlah B	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
	Total A+B	132	245	167	245	185,61	146,71	220	89,80	245	126	119	48,57	94,44	16	13,45	48,57	

**Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit
Berdasarkan Bidang
s.d. Triwulan I 2023**

No.	Jenis PKPT/Bidang	Penugasan Pengawasan (PP)								Laporan Hasil Pengawasan						% Realisasi Laporan dibandingkan Realisasi PP	
		RMP		Realisasi s.d. Bulan ini	Capaian (%)		Input dalam SIMA		RPL		Capaian (%)		Input dalam SIMA				
		Tahun 2023			Tahun 2023	s.d. Bulan ini	Jumlah ST telah Diinput dalam SIMA	% ST yg Diinput dalam SIMA	Tahun 2023	s.d. Bulan ini	Realisasi s.d. Bulan ini	Tahun 2023	s.d. Bulan ini	Jumlah Lap Diinput dalam SIMA	% Lap yg Diinput dalam SIMA		
		PKPT	ST														
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100	8	9=8/5*100	10	11	12	13=12/10*100	14=12/11*100	15	16=15/12*100	17=12/5*100	
A	PKPT																
1	PKPT Awal																
	IPP Perekonomian	29	45	28	45	155,17	160,71	40	88,89	45	28	19	42,22	0,00	1	5,26	42,22
	IPP Polhukam	25	28	22	28	112,00	127,27	22	78,57	28	20	17	60,71	0,00	6	35,29	60,71
	APD	35	65	45	65	185,71	144,44	55	84,62	65	34	24	36,92	0,00	0	0,00	36,92
	AN	23	42	18	42	182,61	233,33	39	92,86	42	14	17	40,48	121,43	0	0,00	40,48
	Investigasi	16	29	18	29	181,25	161,11	28	96,55	29	18	12	41,38	66,67	0	0,00	41,38
	P3A	4	36	36	36	900,00	100,00	36	100,00	36	12	30	83,33	0,00	9	30,00	83,33
	Sub Jumlah 1	132	245	167	245	185,61	146,71	220	89,80	245	126	119	48,57	94,44	16	13,45	48,57
2	PKPT ABT																
	NIHIL																
	Sub Jumlah 2	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Jumlah A	132	245	167	245	185,61	146,71	220	89,80	245	126	119	48,57	94,44	16	13,45	48,57
B	KAP Generik																
	Sub Jumlah B	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Total	132	245	167	245	185,61	146,71	220	89,80	245	126	119	48,57	94,44	16	13,45	48,57

Realisasi Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU) dan Realisasi Laporan yang Terbit
s.d. Bulan Maret 2023

No.	Bagian/Bidang	Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU)					Laporan/Dokumen Hasil Kegiatan					% Realisasi Laporan dibandingkan Realisasi PP
		RMP		Realisasi s.d. Bulan ini	Capaian (%)		RPL		Realisasi s.d. Bulan ini	Capaian (%)		
		Tahun 2023	s.d. Bulan ini		Tahun 2023	s.d. Bulan ini	Tahun 2023	s.d. Bulan ini		Tahun 2023	s.d. Bulan ini	
1	2	3	4	5	$6=5/3*100$	$7=5/4*100$	8	9	10	$11=10/8*100$	$12=10/9*100$	$13=10/5*100$
1	TU	13	13	75	576,92	576,92	13	3	8	61,54	0,00	10,67
	Jumlah	13	13	75	576,92	576,92	13	3	8	61,54	0,00	10,67

**Realisasi Hari Produktif
s.d. Bulan Maret 2023**

No.	Output	Rencana OH Tahun 2023	Realisasi OH s.d. Bulan ini			% Realisasi OH terhadap Rencana OH Tahun 2023	Jumlah Pegawai	Potensi OH		Capaian (%)		OH per Pegawai s.d. Bulan ini	
			Atas PKPT/ PKAU Awal	Atas PKPT/ PKAU Tambahan	Jumlah OH			Tahun 2023	s.d. Bulan ini	Tahun 2023	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6	7=6/3*100	8	9	10	11=6/9*100	12=6/10*100	13=6/8	
A	PKPT												
1	FAG.711	Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut	160	165	0	165	103,13						
		Bidang P3A	160	165									
2	FAG.U11	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah dan Desa	2065	1393	0	1393	67,46						
		Bidang APD	1765	1095									
		Bidang Inv	300	298									
3	FAG.U31	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD	2219	1108	0	1108	49,93						
		Bidang AN	2219	1108									
4	FAG.028	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	5402	3373	0	3373	62,44						
		Bidang IPP1	924	950									
		Bidang IPP2	1107	517									
		Bidang APD	1214	481									
		Bidang AN	339	106									
		Bidang Inv	1743	1315									
		Bidang P3A	75	4									
5	UAG.U21	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia	1818	1050	0	1050	57,76						
		Bidang IPP2	1164	673									
		Bidang APD	135	69									
		Bidang AN	519	308									
6	UAG.U22	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Infrastruktur dan Konektivitas	4776	1032	0	1032	21,61						
		Bidang IPP1	2296	632									
		Bidang IPP2	240	0									
		Bidang APD	800	320									
		Bidang AN	1440	80									
7	UAG.U23	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Ekonomi	2487	1039	0	1039	41,78						
		Bidang IPP1	240	277									
		Bidang APD	952	456									
		Bidang AN	1070	151									
		Bidang Inv	225	155									
8	UAG.U24	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	1524	0	0	0	0,00						
		Bidang Inv	1440	0									
		Bidang IPP1	84	0									
9	UAG.U27	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Daerah	1080	206	0	206	19,07						
		Bidang APD	1080	206									
10	UAG.U41	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Kecurangan	210	13	0	0	0,00						
		Bidang Inv	210	13									
11	UAG.U52	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	3845	463	0	463	12,04						
		Bidang APD	1665	121									
		Bidang P3A	2180	342									
12	UAG.U53	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	893	418	0	0	0,00						
		Bidang AN	893	418									
		Sub Jumlah 1	26479	10260	0	9829	37,12						
B	KAP Generik												
		Sub Jumlah	0	0	0	0	0,00						
		Jumlah PKPT (1+2+3)	26479	10260	0	9829	37,12						
C	PKAU		1170	2718	0	2718	232,31						
		Total PKPT + PKAU	27649	12978	0	12547	269,43						
		Perhitungan Hari Produktif				12547		184	43.608	10.902	28,77	115,09	68

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat
Realisasi Penyerapan Anggaran
s.d. Bulan Maret 2023

No	Program/IKK	Anggaran			% Capaian Penyerapan		
		Tahun 2023	s.d. Bulan ini	Realisasi s.d. Bulan ini	Terhadap Anggaran 2023	Terhadap Rencana s.d. Bulan ini	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100	
A	Program 06						
1	FAG.711	Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut	150.000.000,00	-	19.449.080,00	12,97	-
2	FAG.U11	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah dan Desa	353.785.000,00	-	83.606.500,00	23,63	-
3	FAG.U31	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD	252.215.000,00	-	29.431.360,00	11,67	-
4	FAG.028	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	954.300.000,00	-	113.924.923,00	11,94	-
5	UAG.U21	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia	215.000.000,00	-	82.582.000,00	38,41	
6	UAG.U22	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Infrastruktur dan Konektivitas	556.000.000,00	-	118.438.328,00	21,30	
7	UAG.U23	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Ekonomi	250.600.000,00	-	114.360.640,00	45,63	
8	UAG.U24	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	124.041.000,00	-	-	-	
9	UAG.U27	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Daerah	266.400.000,00	-	62.056.880,00	23,29	
10	UAG.U41	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Kecurangan	31.500.000,00	-	-	-	
11	UAG.U52	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	3.874.599.000,00	-	14.937.632,00	0,39	
12	UAG.U53	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	102.300.000,00	-	18.754.352,00	18,33	
		Sub Jumlah Program 06	7.130.740.000,00	351.622.000,00	657.541.695,00	207,56	-
B	Program 01		46.345.329.000,00	8.027.143.000,00	7.895.945.398,00	17,04	98,37
		Total	53.476.069.000,00	8.378.765.000,00	8.553.487.093,00	15,99	102,09



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**

**LAPORAN KINERJA
PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA BARAT
TRIWULAN II TAHUN 2023**

NOMOR : OT.04/LPP-365/PW10/6/2023

TANGGAL : 27 Juni 2023



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**

Jalan Raya Cibeureum Nomor 50 Bandung 40184
Telepon (022) 6015108 *Faksimile* (022) 6032096
e-mail : jabar@bpkp.go.id

Nomor : OT.04/LPP-365/PW10/6/2023
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Kinerja Perwakilan BPKP
Provinsi Jawa Barat s.d Triwulan II
Tahun 2023

27 Juni 2023

Yth.

Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Tata Kelola
di Jakarta

Berikut kami sampaikan Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat s.d
Triwulan II Tahun 2023.

1. Pencapaian Target *Outcome* sesuai Perjanjian Kinerja

Pengukuran kinerja s.d Triwulan II Tahun 2023 Perwakilan BPKP Jawa Barat dilakukan atas 7 sasaran strategis yang dijabarkan dalam 34 indikator kinerja per posisi tanggal 23 Juni 2023. Ringkasan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja pada setiap sasaran strategis sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

NO.	SASARAN KEGIATAN /IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 5/4
I	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah				
1.1	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	3.349,00	20.930,00	624,96
1.2	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (Juta)	137.919,00	434.678,82	315,17
1.3	Nilai penyelamatan keuangan negara dan Daerah	Rupiah (Juta)	113.184,00	13.486,71	11,92
II	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional				
2.1	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	(%)	85,00	85,00	100,00
2.2	Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi	Kegiatan Prioritas Daerah	2	1	50,00

NO.	SASARAN KEGIATAN /IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
III	Meningkatnya Kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP				
3.1	Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti	(%)	80,00	80,00	100,00
IV	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha				
4.1	Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMD	1	-	-
4.2	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	24	24	100,00
4.3	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	7	7	100,00
4.4	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	220	-	-
4.5	Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUMDes	5	-	-
V	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi				
5.1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	(%) Persen	100,00	100	100,00
5.2	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	(%) Persen	85,00	85	100,00
5.3	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Pemda	6	2	33,33
5.3	Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Badan Usaha	2	0	-
VI	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU				
6.1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Provinsi	1	1	100,00
6.2	Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Kabupaten/ Kota	22	10	45,45
6.3	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Provinsi	1	1	100,00
6.4	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Kabupaten/ Kota	25	20	80,00
6.5	Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3	Kabupaten/ Kota	5	5	100,00
6.6	Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja	Pemda	23	0	-
6.7	Jumlah desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	25	40	160,00
6.8	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	25	0	-

NO.	SASARAN KEGIATAN /IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
6.9	Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3	BUMD	4	0	-
6.10	Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3	BLUD	4	0	-
6.11	Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	BUMD	3	0	-
6.12	Jumlah BLUD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	BLUD	1	0	-
VII	Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja				
7.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75	0	-
7.2	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82	0	-
7.3	Persentase efektivitas pengendalian intern Unit Kerja (SPIP Unit kerja)	(%) Persen	70,00	0	-
7.4	Persentase penyelesaian RTP (MR Unit kerja)	(%) Persen	100,00	0	-
7.5	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	75	0	-
7.6	Skor IKPA Unit Kerja	Indeks Skala 100	95	98,37	103,55
7.7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala 100	80	0	-

Realisasi kinerja Tahun 2023 berdasarkan sasaran kegiatan Perwakilan BPKP Jawa Barat dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai auditor intern pemerintah diuraikan di bawah ini:

Sasaran Kegiatan I: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target 2023	Realisasi TW II 2023	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
1.1	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	3.349,00	20.930,00	624,96
1.2	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (Juta)	137.919,00	434.678,82	315,17
1.3	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Juta)	113.184,00	13.486,71	11,92

1.1.1. Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi

Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi sebesar Rp20.929.999.136,25 diperoleh dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang APD dengan penugasan berupa Evaluasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

(OPAD) Tahun 2023 pada 3 pemda yaitu Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Bandung dan Kota Bekasi.

1.1.2. Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah

Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah merupakan nilai yang menunjukkan besarnya pengurangan/pengalihan nilai pengeluaran yang direncanakan. Target kinerja ini pada Tahun 2023 sebesar Rp137.919.000.000,00.

Pada tahun 2023, nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah sebesar Rp434.678.821.354,60 atau mencapai 315,17% dari target tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

No	Bidang Pengawasan	Realisasi (Rp)
1	IPP 1	6.498.373.793,60
2	IPP 2	329.997.882.800,00
3	APD	98.182.564.761,00
	Jumlah	434.678.821.354,60

Nilai efisiensi diatas Tahun 2023 sebesar Rp434.678.821.354,60 diperoleh atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang-bidang, dengan uraian sebagai berikut:

1) Bidang IPP diperoleh dari pengawasan:

- a) Laporan Hasil Reviu atas Perencanaan Pembangunan Hunian Tetap Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur Tahap I.
- b) Laporan Hasil Reviu Penganggaran Penanganan Infrastruktur Pasca Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat Sektor Bina Penataan Bangunan
- c) Evaluasi atas Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu dan Pemilihan Tahun 2023 dan 2024 pada Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) di 3 pemda yakni Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Karawang.
- d) Evaluasi atas Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu dan Pemilihan Tahun 2023 dan 2024 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di 3 pemda yakni Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Karawang.
- e) Pegawasan Akuntabilitas Pengaman dan Pengawasan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 pada Kabupaten Sumedang.

2. Bidang APD diperoleh dari pengawasan:

- a) Evaluasi Program Gerakan Membangun Desa dalam rangka Pembangunan Desa yang Mandiri di Wilayah Provinsi Jawa Barat yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat
- b) Evaluasi atas Perencanaan dan Penganggaran (Evrn) Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat
- c) Evaluasi atas Perencanaan dan Penganggaran (Evrn) Sektor Pariwisata pada 5 pemda yakni Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta
- d) Evaluasi atas Perencanaan dan Penganggaran (Evrn) Sektor Katahanan Pangan pada 5 pemda yakni Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta
- e) Evaluasi atas Perencanaan dan Penganggaran (Evrn) Sektor UMKM pada 5 pemda yakni Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta

1.1.3. Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah

Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah merupakan nilai yang menunjukkan besarnya pengurangan/pengalihan nilai pengeluaran yang direncanakan. Target kinerja ini pada Tahun 2023 sebesar Rp113.184.000.000,00. Pada tahun 2023, nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah sebesar Rp13.486.712.340,98 atau mencapai 11,92% dari target tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut :

No	Bidang Pengawasan	Realisasi (Rp)
1	IPP 1	6.212.663.110,98
2	IPP 2	754.509.230,00
3	Investigasi	6.519.540.000,00
	Jumlah	13.486.712.340,98

Nilai penyelamatan sebesar Rp13.486.712.340,98 diperoleh atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang-bidang, dengan uraian sebagai berikut:

1) Bidang IPP diperoleh dari pengawasan:

- a) Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Pekerjaan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir Bandang Sungai DAS Cimanuk Kabupaten Garut Tahun 2022

- b) Laporan Auditor Independen Dukungan atas Laporan Keuangan Dam Operational Improvement and Safety Project Phase II /DOISP II (Loan IBRD No.8711 ID dan Loan AIIB No. 000010 - 1- IDN) pada PIU BBWS Cimanuk Cisarung per 31 Desember 2022
 - c) Laporan Auditor Independen Dukungan atas Laporan Keuangan the Development of Integrated Farming System in Upland Areas Project (UPLAND) Kementerian Pertanian pada:
 - i. Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada 31 Desember 2022
 - ii. PIU Dinas Pertanian Kabupaten Garut untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada 31 Desember 2022
 - iii. BBWS Citarum untuk Tahun Anggaran yang berakhir 31 Desember 2022
 - d) Laporan Hasil Audit Dukungan atas Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)/National Slum Upgrading Project (NSUP) IsDB Loan IDN-1011 pada:
 - i. Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat Tahun Anggaran 2022
 - ii. Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Jawa Barat Skala Kawasan Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2022
 - iii. Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Jawa Barat Skala Kawasan Kota Cirebon Tahun Anggaran 2022
 - e) Evaluasi Pengelolaan BOS Tahun 2022-2023
 - i. Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Tasikmalaya
 - ii. Jenjang SMA dan SMK Provinsi Jawa Barat dengan Uji Petik pada Kota Cirebon
 - iii. Madrasah pada Kota Cirebon Tahun 2022-2023
- 2. Bidang Investigasi diperoleh dari pengawasan:**
- a) PKKN atas Kasus TPK Pengadaan Budidaya Domba di Kota Bekasi Tahun 2021
 - b) Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Anggaran Insentif Tenaga Kesehatan bagi yang Menangani Covid-19 pada UPTD RSUD Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi TA 2020 dan 2021.

Sasaran Kegiatan II: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target 2023	Realisasi TW II 2023	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
2.1	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persen	85,00	85,00	100
2.2	Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi	Kegiatan Prioritas Daerah	2	1	50

2.2.1. Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan

Capaian persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan mencapai 100% yang dilakukan oleh Bidang Investigasi yang berasal dari penugasan identifikasi dan pengembangan informasi awal atas resiko dan permasalahan terhadap evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Lintas Sektoral Reforma Agraria.

2.2.1. Jumlah kegiatan pembangunan prioritas daerah yang diawasi

Target jumlah kegiatan pembangunan prioritas daerah yang diawasi sebanyak 2 kegiatan yang merupakan kegiatan prioritas daerah atas hasil pengawasan APPD. Adapun realisasi baru dilaksanakan 1 kegiatan yaitu Evaluasi Program Gerakan Membangun Desa yang Mandiri di wilayah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sasaran Kegiatan III: Meningkatnya Kesadaran Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan pada K/L/D/BU yang Menjadi Tanggung Jawab Perwakilan BPKP

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target 2023	Realisasi TW II 2023	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
3.1	Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti	Persen	80,00	80,00	100,00

3.3.1 Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti

Capaian persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan mencapai 100% yang dilakukan oleh Bidang Investigasi yang berasal dari penugasan sebagai berikut:

- a) Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) Lintas Sektor Reformasi Agraria pada 3 pemda yang meliputi Kabupaten Subang, Provinsi Jabar dan Kabupaten Garut,
- b) Penilaian Risiko Kepatuhan, Kinerja, Korupsi dan Hambatan Kelancaran Pembangunan (K3HKP) pada Program P3DN:
 - i. Sektor ESDM pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat
 - ii. Perumda Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung
- c) Pengukuran Indeks Kepatuhan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan identifikasi Area of Improvement di 3 pemda yakni Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta dan Kota Bandung
- d) Audit Tujuan Tertentu atas Akuntabilitas Pengadaan Logistik dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Persiapan dan Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 pada Kabupaten Bandung dan Kabupaten Karawang
- e) Audit Tujuan Tertentu Akuntabilitas Logistik & DPT KPU

Sasaran Kegiatan IV: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target 2023	Realisasi TW II 2023	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
4.1	Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMD	1	-	
4.2	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	24	24	100,00
4.3	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	7	7	100,00
4.4	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	220	-	
4.5	Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUMDes	5	-	

Pencapaian sasaran kegiatan 3: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha diukur dengan menggunakan 5 (lima) indikator kinerja diatas, dengan penjelasan sebagai berikut:

4.1. Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik

IKK Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik belum ada realisasi s.d Triwulan II Tahun 2023.

4.2. Jumlah BUMD dengan kinerja sehat

Pada tahun 2023, realisasi jumlah BUMD dengan kinerja sehat sebanyak 24 BUMD atau mencapai 100% dari target tahun 2023, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

No	BUMD Kinerja Sehat	Tingkat Kesehatan	Predikat
1	Evaluasi Kinerja Perumda Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Tahun Buku 2023	4,17	Sehat
2	Evaluasi Kinerja Perumda Air Minum Kabupaten Majalengka Tahun Buku 2023	3,45	Sehat
3	Evaluasi Kinerja Perumdam Tirta Medal Kabupaten Sumedang Tahun Buku 2023	3,10	Sehat
4	Evaluasi Kinerja Perumda Tirta Dharma Ayu Kabupaten Indramayu Tahun Buku 2023	3,18	Sehat
5	Evaluasi Kinerja Perumdam Tirta Gangga Kabupaten Subang Tahun buku 2023	3,12	Sehat
6	Evaluasi Kinerja Perumdam Tirta Rahayu Kabupaten Purwakarta Tahun Buku 2023	2,87	Sehat
7	Evaluasi Kinerja Perumda Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun Buku 2023	3,21	Sehat
8	Evaluasi Kinerja pada PDAM Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi Tahun Buku 2023	3,14	Sehat
9	Evaluasi Kinerja pada Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi Tahun 2023	3,64	Sehat
10	Evaluasi Kinerja pada Perumda Air Minum Tirta Mukti Kabupaten Cianjur Tahun Buku 2023	3,55	Sehat
11	Evaluasi Kinerja pada Perumda Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung Tahun Buku 2023	4,16	Sehat
12	Evaluasi Kinerja Perumda Tirta Intan Kabupaten Garut Tahun 2023	3,34	Sehat
13	Evaluasi Kinerja Perumda Air Minum Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023	3,22	Sehat
14	Evaluasi Kinerja Perumda Air Minum Tirta Galuh Ciamis Tahun 2023	3,34	Sehat
15	Evaluasi Kinerja Perumdam Tirta Pakuan Kota Bogor Tahun Buku 2023	4,17	Sehat
16	Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi Tahun 2023	3,32	Sehat
17	Evaluasi Kinerja Perumdam Tirtawening Kota Bandung	3,23	Sehat
18	Evaluasi Kinerja pada Perumda Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon Tahun Buku 2023	3,31	Sehat
19	Evaluasi Kinerja pada Perumdam Tirta Patriot Kota Bekasi Tahun Buku 2023	3,35	Sehat
20	Evaluasi Kinerja pada PT Tirta Asasta Depok (Perseroda) Tahun Buku 2023	4,06	Sehat
21	Evaluasi Kinerja pada Perumda Tirta Anom Kota Banjar Tahun Buku 2023	2,92	Sehat

No	BUMD Kinerja Sehat	Tingkat Kesehatan	Predikat
22	Evaluasi Kinerja Perumda Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan Tahun Buku 2023	3,70	Sehat
23	Evaluasi Kinerja Perumda Jati Kabupaten Cirebon Tahun Buku 2023	3,15	Sehat
24	Evaluasi Kinerja PD Pembangunan	77,30	Sehat

4.3. Jumlah BLUD dengan kinerja sehat

Pada tahun 2023, realisasi jumlah BLUD dengan kinerja sehat sebanyak 7 (tujuh) BLUD atau mencapai 100% dari target tahun 2023. Realisasi tersebut diperoleh atas hasil pengawasan berupa evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Bidang Akuntan Negara yaitu:

No	BLUD dengan kinerja sehat	Skor	Kategori
1	Evaluasi kinerja BLUD RSUD Kabupaten Karawang Tahun Buku 2023	79,00	Sehat
2	Evaluasi Kinerja BLUD RSUD Sayang Kabupaten Cianjur Tahun Buku 2023	76,00	Sehat
3	Evaluasi Kinerja dan Tatakelola BLUD RSUD Kabupaten Subang Tahun Buku 2023	83,40	Sehat
4	Evaluasi Kinerja BLUD RSUD Kabupaten Majalengka	76,00	Sehat
5	Evaluasi Kinerja BLUD RSUD Gunung Jati Kota Cirebon	88,00	Sehat
6	Evaluasi Kinerja BLUD RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya Tahun Buku 2023	68,50	Sehat
7	Evaluasi Kinerja BLUD Rumah Sakit Bayu Asih Kabupaten Purwakarta Tahun 2023	77,00	Sehat

4.4. Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 belum ada realisasi untuk IKK Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan.

4.5. Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 belum ada realisasi untuk IKK Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa.

Sasaran Kegiatan V: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target 2023	Realisasi TW II 2023	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
5.1	Persentase hasil pengawasan represif	Persen	100,00	100,00	100,00

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target 2023	Realisasi TW II 2023	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
	yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti				
5.2	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen	85,00	85,00	100,00
5.3	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Pemda	6	2	33,33
5.4	Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Badan Usaha	2	0	0

5.5.1. Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti

Realisasi persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti telah tercapai sebesar 100% diperoleh dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Investigasi berupa kegiatan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus Tindak Pidana Kasus Pengadaan Budidaya Domba di Kota Bekasi Tahun 2021.

5.5.2. Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti

Capain kinerja hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti sebesar 100% diperoleh dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Investigasi yang berasal dari kegiatan Fraud Risk Assesment atas perencanaan dan penganggaran pada Bawaslu Provinsi Jawa Barat; dan penilaian risiko kepatuhan, kinerja, korupsi dan hambatan kelancaran pembangunan (K3HKP) Program P3DN pada Perumda Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung.

5.5.3. Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik

Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik mencapai 33,33% atau 2 pemda dari target 6 pemda yaitu penugasan sebagai Narasumber untuk materi SPIP Terintegrasi termasuk MRI dan IEPK pada Pemerintah Kota Sukabumi dan materi IEPK pada Kegiatan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

5.5.4. jumlah badan usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, belum ada realisasi untuk IKK Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik.

Sasaran Kegiatan VI: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target 2023	Realisasi TW II 2023	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
6.1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Provinsi	1	1	100,00
6.2	Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Kab/Kota	22	10	45,45
6.3	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Provinsi	1	1	100,00
6.4	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Kab/Kota	25	20	80,00
6.5	Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3	Kab/Kota	5	5	100,00
6.6	Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja	Pemda	23	-	0
6.7	Jumlah desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	25	40	160,00
6.8	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	25	-	0
6.9	Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3	BUMD	4	-	0
6.10	Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3	BLUD	4	-	0
6.11	Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	BUMD	3	-	0
6.12	Jumlah BLUD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	BLUD	1	-	0

6.6.1. Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3

Capaian Kinerja Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 telah mencapai 100%.

6.6.2. Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3

Realisasi Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 sebanyak 10 Pemda yakni: Kabupaten Bogor, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kota Cirebon, Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Banjar dan Kota Bekasi.

6.6.3. Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3

Capaian Kinerja Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 telah mencapai 100%

6.6.4. Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3

Target kinerja Tahun 2023 sebanyak 25 kabupaten/kota. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 telah realisasi jumlah kabupaten/kota dengan maturitas level SPIP \geq Level 3 sebanyak 20 pemda atau mencapai 80% dari target Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pemda	SPIP		
		Skor	Level	Predikat
1	Kabupaten Bandung	3,0602	3	Terdefinisi
2	Kabupaten Bogor	3	3	Terdefinisi
3	Kabupaten Ciamis	3,3352	3	Terdefinisi
4	Kabupaten Cirebon	3,2622	3	Terdefinisi
5	Kabupaten Garut	3,038	3	Terdefinisi
6	Kabupaten Indramayu	3	3	Terdefinisi
7	Kabupaten Kuningan	3	3	Terdefinisi
8	Kabupaten Pangandaran	3,123	3	Terdefinisi
9	Kabupaten Purwakarta	3,241	3	Terdefinisi
10	Kabupaten Subang	3	3	Terdefinisi
11	Kabupaten Sukabumi	3,294	3	Terdefinisi
12	Kabupaten Sumedang	3,038	3	Terdefinisi
13	Kota Bandung	3	3	Terdefinisi
14	Kota Banjar	3,023	3	Terdefinisi
15	Kota Bekasi	3,06	3	Terdefinisi
16	Kota Bogor	3	3	Terdefinisi
17	Kota Cirebon	3,109	3	Terdefinisi
18	Kota Depok	3,038	3	Terdefinisi
19	Kota Sukabumi	3,085	3	Terdefinisi
20	Kota Tasikmalaya	3,028	3	Terdefinisi

6.6.5. Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3

Target kinerja ini pada tahun 2023 sebanyak 5 kabupaten/kota.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, realisasi jumlah kabupaten/kota dengan MRI \geq Level 3 sebanyak 5 pemda atau mencapai 100,00% dari target yaitu: Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sukabumi dan Kota Cirebon sesuai dengan tabel berikut:

No	Nama Pemda	MRI	
		Skor	Level
1	Kabupaten Ciamis	3,02	3
2	Kabupaten Pangandaran	3,03	3
3	Kabupaten Purwakarta	3,04	3

No	Nama Pemda	MRI	
		Skor	Level
4	Kabupaten Sukabumi	3,01	3
5	Kota Cirebon	3,06	3

6.6.6. Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, IKK Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja belum terealisasi.

6.6.7. Jumlah desa yang pengelolaannya akuntabel

Target kinerja ini pada tahun 2023 sebanyak 25 desa.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, realisasi Jumlah desa yang pengelolaannya akuntabel telah mencapai 40 desa atau sebesar 160,00% dari target 25 desa, dengan rincian sebagai berikut:

No	Penugasan	Evaluasi Desa
1	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Keuangan Desa Triwulan I Tahun 2023 Kabupaten Cirebon	10 Desa
2	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Keuangan Desa Triwulan I tahun 2023 Kabupaten Pangandaran	10 Desa
3	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Keuangan Desa Triwulan II Tahun 2023 pada Kabupaten Bekasi	10 Desa
4	Monitoring dan Evaluasi atas Akuntabilitas Keuangan Desa sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bandung	10 Desa

Adapun untuk 5 indikator kinerja lainnya yakni: Indikator Kinerja Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai, Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3, Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3, Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3 dan Jumlah BLUD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3 belum ada realisasi s.d Triwulan II Tahun 2023.

Sasaran Kegiatan VII: Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target 2023	Realisasi TW II 2023	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
7.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75,00	-	0
7.2	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82,00	-	0

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target 2023	Realisasi TW II 2023	Capaian (%)
7.3	Persentase efektivitas pengendalian intern Unit Kerja (SPIP Unit kerja)	(%)	70,00	-	0
7.4	Persentase penyelesaian RTP (MR Unit kerja)	(%)	100,00	-	0
7.5	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	75,00	-	0
7.6	Skor IKPA Unit Kerja	Indeks Skala 100	95,00	98,37	103,55
7.7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala 100	80,00	-	0

Dari tujuh indikator kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja s.d Triwulan II Tahun 2023 baru terealisasi 1 indikator yaitu Indikator Kinerja Skor IKPA Unit Kerja dengan nilai 98,37.

Rincian selengkapnya target dan realisasi kinerja sasaran s.d Triwulan II Tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran 1

2. Pencapaian Target Sintesa Hasil Pengawasan (SHP)

Sesuai RKA-KL revisi ke 4 tanggal 25 Mei 2023, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat ditargetkan untuk menghasilkan Sintesa Hasil Pengawasan (SHP) sebanyak 112 SHP yang disusun berdasarkan topik pengawasan.

Realisasi SHP pengawasan s.d. bulan Juni 2023 berdasarkan SIMA Executive sebanyak 65 SHP (58,04%).

Rincian rencana dan realisasi *output* pengawasan s.d. bulan Juni 2023 disajikan pada Lampiran 2.

3. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pengawasan (PKPT)

a. PKPT Awal sesuai SIMA

Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) Program Kinerja Penugasan Tahunan (PKPT) Awal di s.d. Triwulan II Tahun 2023 sebanyak 477 PP atau 112,77% dari Rencana Mulai Penugasan (RMP) sebanyak 423 PP.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan Triwulan II 2023 sebanyak 312 laporan yakni 86,67% dari Rencana Penerbitan Laporan (RPL) sebanyak 360 laporan atau sebesar 65,41% dari PP yang telah terbit Surat Tugasnya sebanyak 477 PP.

Realisasi PP s.d. Triwulan II yang telah di-entry ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 425 PP atau 89,10% dari jumlah PP yang telah terbit ST-nya sebanyak 477 PP. Sedangkan realisasi laporan yang telah di-entry sebanyak 104 laporan atau 33,33% dari jumlah laporan terbit sebanyak 312 laporan.

Atas hal tersebut kami telah menyarankan kepada para Korwas menginstruksikan kepada Ketua Tim untuk menginput laporan tepat waktu, dan kepada para Dalnis dan Korwas untuk melakukan revidi berjenjang atas laporan yang diinput oleh Ketua Tim dalam aplikasi SIMA.

b. PKPT Anggaran Belanja Tambahan (ABT)

Belum ada realisasi atas penugasan PKPT ABT.

c. Kerangka Acuan Pengawasan (KAP) Generik

Belum ada realisasi penugasan yang berasal dari KAP Generik

Rincian pelaksanaan laporan kinerja Triwulan II Tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) disajikan pada Lampiran 3 dan 4, sedangkan pelaksanaan laporan kinerja Triwulan II Tahun 2023 berdasarkan Bidang Pengawasan disajikan dalam Lampiran 5.

4. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pendukung Pengawasan (PKAU)

Realisasi penugasan Program Kerja Administrasi Umum (PKAU) s.d Triwulan II Tahun 2023 sebanyak 13 PP atau 100% dari rencana sebanyak 13 PP.

Realisasi penerbitan laporan/dokumen dukungan pengawasan s.d Triwulan II Tahun 2023 sebanyak 5 laporan/dokumen atau 100% dari rencana sebanyak 5 laporan/dokumen.

Rincian pelaksanaan RKT Dukungan Pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2023 disajikan pada Lampiran 6.

5. Penggunaan Hari Produktif

Realisasi penggunaan hari pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2023 sebanyak 19.427 OH atau 64,04% dari rencana hari pengawasan satu tahun (Tahun 2023) sebanyak 30.336 OH.

Realisasi penggunaan hari produktif pengawasan per pegawai s.d. Triwulan II Tahun 2023 sebanyak 250 OH dan 105,49% dari potensi setahun sebanyak 237 OH.

Realisasi penggunaan hari produktif s.d. Triwulan II disajikan pada Lampiran 7.

6. Penyerapan Anggaran

Berdasarkan data dari Sub Bagian Keuangan, realisasi anggaran s.d Triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp 23.432.535.594,00 atau 105,24% dari rencana s.d Triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp 22.266.702.000,00. Jika dibandingkan anggaran Tahun 2023 sebesar Rp43.057.614.000,00 maka realisasinya sebesar 54,42%.

Rencana dan realisasi anggaran s.d bulan Juni 2023 disajikan pada Lampiran 8.

Demikian Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2023 kami sampaikan.

Atas perhatian dan perkenannya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Samono

PERWAKILAN BPKP JAWA BARAT
TARGET DAN REALISASI OUTCOME SESUAI PERJANJIAN KINERJA
REALISASI S.D TRIWULAN II TAHUN 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		Realisasi TW II	Capaian %
		Satuan	Jumlah		
1	2	3	4	5	6= (5/4)*100
1 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1.1 Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	3.349,00	20.930,00	624,96
	1.2 Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (Juta)	137.919,00	434.678,82	315,17
	1.3 Nilai penyelamatan keuangan negara dan Daerah	Rupiah (Juta)	113.184,00	13.486,71	11,92
2 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	2.1 Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	(%)	85,00	85,00	100,00
	2.2 Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi	Kegiatan Prioritas Daerah	2	1	50,00
3 Meningkatkan Kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP	3.1 Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti	(%)	80,00	80,00	100,00
4 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	4.1 Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMD	1	-	-
	4.2 Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	24	24	100,00
	4.3 Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	7	7	100,00
	4.4 Jumlah BUMDes yang mampu	BUMDes	220	-	-
	4.5 Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUMDes	5	-	-
5 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	5.1 Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	(%)	100,00	100	100,00
	5.2 Persentase hasil Pengawasan	(%)	85,00	85	100,00
	5.3 Jumlah Pemda dengan efektivitas	Pemda	6	2	33,33
	5.4 Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Badan Usaha	2	0	-
6 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	6.1 Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3	Provinsi	1	1	100,00
	6.2 Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3	Kabupaten/Kota	22	10	45,45
	6.3 Jumlah Provinsi dengan Maturitas	Provinsi	1	1	100,00
	6.4 Jumlah Kabupaten/Kota dengan	Kabupaten/Kota	25	20	80,00
	6.5 Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI	Kabupaten/Kota	5	5	100,00
	6.6 Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja	Pemda	23	-	-
	6.7 Jumlah desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	25	40	160,00
	6.8 Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara	Desa	25	-	-
	6.9 Jumlah BUMD dengan MRI ≥ Level 3	BUMD	4	-	-
	6.10 Jumlah BLUD dengan MRI ≥ Level 3	BLUD	4	-	-
	6.11 Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI ≥ Level 3	BUMD	3	-	-
	6.12 Jumlah BLUD dengan Kapabilitas SPI ≥ Level 3	BLUD	1	-	-
7 Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja	7.1 Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75,00	-	-
	7.2 Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82,00	-	-
	7.3 Persentase efektivitas pengendalian intern Unit Kerja (SPIP Unit kerja)	(%)	70,00	-	-
	7.4 Persentase penyelesaian RTP (MR Unit kerja)	(%)	100,00	-	-
	7.5 Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	75,00	-	-
	7.6 Skor IKPA Unit Kerja	Indeks Skala 100	95,00	98,37	103,55
	7.7 Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala 100	80,00	-	-

Target dan Realisasi Sintesa Hasil Pengawasan Pengawasan
Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2023

No.	Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target sesuai Perkin/RKA Terakhir		Realisasi s.d. Bulan ini			Capaian (%)	
				Tahun 2023	s.d. Bulan ini	Perkin/RKA Terakhir	Tambahan	Total	Tahun 2023	s.d. Bulan ini
1		2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=8/4x100	10=8/5x100
1	FAG.711	Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut	Laporan	2	1	0	0	0	0,00	0,00
		Bidang P3A	Laporan		0	0	0	0		
2	FAG.U11	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah dan Desa	Laporan	6	3	10	0	10	166,67	3,33
		Bidang IPP1	Laporan		0	1	0			
		Bidang APD	Laporan		3	8	0			
		Bidang Inv	Laporan		0	1	0			
3	FAG.U31	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD	Laporan	5	0	6	0	6	120,00	0,00
		Bidang AN	Laporan		0	6	0			
4	FAG.028	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	Laporan	29	7	12	0	12	41,38	171,43
		Bidang IPP1	Laporan		0	1	0			
		Bidang IPP2	Laporan		4	5	0			
		Bidang APD	Laporan		2	4	0			
		Bidang AN	Laporan		0	0	0			
		Bidang Inv	Laporan		1	2	0			
		Bidang P3A	Laporan		0	0	0			
5	UAG.U21	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia	Laporan	10	2	9	0	9	90,00	0,00
		Bidang IPP1	Laporan		0	0	0			
		Bidang IPP2	Laporan		0	3	0			
		Bidang APD	Laporan		1	3	0			
		Bidang AN	Laporan		1	3	0			
6	UAG.U22	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Infrastruktur dan Konektivitas	Laporan	8	3	12	0	12	150,00	400,00
		Bidang IPP1	Laporan		1	4	0			
		Bidang IPP2	Laporan		0	0	0			
		Bidang APD	Laporan		1	3	0			
		Bidang AN	Laporan		1	5	0			
7	UAG.U23	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Ekonomi	Laporan	6	12	14	0	14	233,33	116,67
		Bidang IPP2	Laporan		8	8	0			
		Bidang APD	Laporan		3	3	0			
		Bidang AN	Laporan		0	0	0			
		Bidang Inv	Laporan		1	3	0			
8	UAG.U24	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	Laporan	8	0	0	0	0	0,00	0,00
		Bidang IPP1	Laporan		0	0	0			
		Bidang Inv	Laporan		0	0	0			
9	UAG.U27	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Daerah	Laporan	2	0	0	0	0	0,00	0,00
		Bidang APD	Laporan		0	0	0			
10	UAG.U41	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Kecurangan	Laporan	2	0	1	0	1	50,00	0,00
		Bidang Inv	Laporan		0	1	0			
11	UAG.U52	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	Laporan	30	0	0	0	0	0,00	0,00
		Bidang APD	Laporan		0	0	0			
		Bidang P3A	Laporan		0	0	0			
12	UAG.U53	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	Laporan	4	1	1	0	1	25,00	0,00
		Bidang AN	Laporan		0	1	0			
		Jumlah		112	29	65	0	65	58,04	224,14

Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit
Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan
Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2023

No.	Output	Penugasan Pengawasan (PP)								Laporan Hasil Pengawasan						% Realisasi Laporan dibandingkan Realisasi PP		
		RMP		s.d. Bulan ini	Realisasi s.d. Bulan ini	Capaian (%)		Input dalam SIMA		RPL		Realisasi s.d. Bulan ini	Capaian (%)		Input dalam SIMA			
		Tahun 2023				Tahun 2023	s.d. Bulan ini	Jumlah ST telah Diinput dalam SIMA	% ST yg Diinput dalam SIMA	Tahun 2023	s.d. Bulan ini		Tahun 2023	s.d. Bulan ini	Tahun 2023		s.d. Bulan ini	Jumlah Lap Diinput dalam SIMA
		PKPT	ST															
1	2	3	ST	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100	8	9=8/5*100	10	11	12	13=12/10*100	14=12/11*100	15	16=15/12*100	17=12/5*100	
A	PKPT																	
1	PKPT Awal																	
1	FAG.711	Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut	1	25	25	25	100,00	0,00	24	96,00	25	25	20	0,00	0,00	10	0,00	80,00
		Bidang P3A	1	25	25	25			24		25	25	20			10		
		501		23	23	23			22		23	23	18			9		
		502		2	2	2			2		2	2	2			1		
2	FAG.U11	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah dan Desa	15	70	57	70	100,00	122,81	60	85,71	70	53	36	51,43	0,00	12	0,00	51,43
		Bidang IPP1	5	3	2	3			3		3	2	2			2		
		Bidang APD	9	46	34	46			37		46	30	27			10		
		Bidang Inv	1	21	21	21			20		21	21	7			0		
3	FAG.U31	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD	7	67	67	67	100,00	0,00	66	98,51	67	47	54	0,00	0,00	7	0,00	80,60
		Bidang AN	7	67	67	67			66		67	47	54			7		
4	FAG.028	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	44	73	74	73	100,00	98,65	70	95,89	73	60	55	75,34	0,00	22	40,00	75,34
		Bidang IPP1	8	16	15	16			16		16	15	14			7		
		Bidang IPP2	13	22	22	22			22		22	22	16			7		
		Bidang APD	11	17	16	17			17		17	5	11			7		
		Bidang AN	4	0	1	0			0		0	1	0			0		
		Bidang Inv	7	15	17	15			12		15	17	12			0		
		Bidang P3A	1	3	3	3			3		3	0	2			1		
5	UAG.U21	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia	18	33	35	33	100,00	94,29	32	96,97	33	27	28	84,85	103,70	7	25,00	84,85
		Bidang IPP2	11	23	25	23			23		23	19	21			4		
		201	10	18	20	18			18		18	19	16			3		
		301	1	5	5	5			5		5	0	5			1		
		Bidang APD	3	6	6	6			5		6	6	5			2		
		Bidang AN	4	4	4	4			4		4	2	2			1		
		201		3	3	3			3		3	1	1			1		
		301		1	1	1			1		1	1	1			0		
6	UAG.U22	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Infrastruktur dan Konektivitas	20	68	66	68	100,00	103,03	45	66,18	68	61	45	66,18	0,00	7	0,00	66,18
		Bidang IPP1	11	49	48	49			28		49	48	29			1		
		Bidang IPP2	1	1	0	1			1		1	0	0			0		
		Bidang APD	4	13	13	13			11		13	8	11			5		
		Bidang AN	4	5	5	5			5		5	5	5			1		
7	UAG.U23	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Ekonomi	14	25	26	25	100,00	96,15	25	100,00	25	25	18	72,00	72,00	3	0,00	72,00
		Bidang IPP1	5	7	7	7			7		7	7	5			0		
		Bidang APD	5	8	9	8			8		8	8	7			3		
		Bidang AN	3	5	5	5			5		5	5	4			0		
		Bidang Inv	1	5	5	5			5		5	5	2			0		

8	UAG.U24	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	8	0	0	0	#DIV/0!	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Bidang IPP1	2	0	0	0			0		0	0	0			0		
		Bidang Inv	6	0	0	0			0		0	0	0			0		
9	UAG.U27	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Daerah	2	5	4	5	100,00	125,00	5	100,00	5	4	2	0,00	0,00	2	0,00	40,00
		Bidang APD	2	5	4	5			5		5	4	2			2		
		101																
		201		5	4	5			5		5	4	2			2		
		401									0					0		
10	UAG.U41	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Kecurangan	1	4	4	4	100,00	100,00	4	100,00	4	4	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		Bidang Inv	1	4	4	4			4		4	4	0			0		
11	UAG.U52	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	4	98	56	98	100,00	0,00	85	86,73	98	45	47	47,96	0,00	31	0,00	47,96
		Bidang APD	2	53	11	53			52		53	0	18			15		
		Bidang P3A	2	45	45	45			33		45	45	29			16		
12	UAG.U53	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	1	9	9	9	100,00	100,00	9	100,00	9	9	7	77,78	0,00	3	42,86	77,78
		Bidang AN	1	9	9	9			9		9	9	7			3		
		Sub Jumlah 1	135	477	423	477	100,00	112,77	425	89,10	477	360	312	65,41	86,67	104	33,33	65,41

Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit
Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan
Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2023

No.	Output	Penugasan Pengawasan (PP)								Laporan Hasil Pengawasam						% Realisasi Laporan dibandingkan Realisasi PP	
		Rencana		Realisasi s.d. Bulan ini	Capaian (%)		Input dalam SIMA		Rencana		Capaian (%)		Input dalam SIMA				
		Tahun 2023			Tahun 2023	s.d. Bulan ini	Jumlah ST telah Diinput dalam SIMA	% ST yg Diinput dalam SIMA	Tahun 2023	s.d. Bulan ini	Realisasi s.d. Bulan ini	Tahun 2023	s.d. Bulan ini	Jumlah Lap Diinput dalam SIMA	% Lap yg Diinput dalam SIMA		
		PKPT	ST														
1	2	3		4	5	6=5/3*100	7=5/4*100	8	9=8/5*100	10	11	12	13=10/8*100	14=10/9*100	15	16=15/12*100	17=12/5*100
A	PKPT																
2	PKPT ABT																
	NIHIL																
	Sub Jumlah 2	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Jumlah A	135	477	423	477	353,33	112,77	425	89,10	477	360	312	65,41	86,67	104	33,33	65,41
B	KAP Generik																
	NIHIL																
	Sub Jumlah B	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Total A+B	135	477	423	477	353,33	112,77	425	89,10	477	360	312	65,41	86,67	104	33,33	65,41

Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit
Berdasarkan Bidang
Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2023

No.	Jenis PKPT/Bidang	Penugasan Pengawasan (PP)								Laporan Hasil Pengawasan							% Realisasi Laporan dibandingkan Realisasi PP	
		RMP			Realisasi s.d. Bulan ini	Capaian (%)		Input dalam SIMA			RPL			Capaian (%)		Input dalam SIMA		
		Tahun 2023		s.d. Bulan ini		Tahun 2023	s.d. Bulan ini	Jumlah ST telah Diinput dalam SIMA	% ST yg Diinput dalam SIMA	Tahun 2023	s.d. Bulan ini	Realisasi s.d. Bulan ini	Tahun 2023	s.d. Bulan ini	Jumlah Lap Diinput dalam SIMA	% Lap yg Diinput dalam SIMA		
		PKPT	ST															
1	2	3		4	5	6=5/3*100	7=5/4*100	8	9=8/5*100	10	11	12	13=12/10*100	14=12/11*100	15	16=15/12*100	17=12/5*100	
A	PKPT																	
1	PKPT Awal																	
	IPP Perekonomian	31	75	72	75	241,94	104,17	54	72,00	75	72	50	66,67	0,00	10	20,00	66,67	
	IPP Polhukam	25	46	47	46	184,00	97,87	46	100,00	46	41	37	80,43	0,00	11	29,73	80,43	
	APD	36	148	93	148	411,11	159,14	135	91,22	148	61	81	54,73	0,00	44	54,32	54,73	
	AN	23	90	91	90	391,30	98,90	89	98,89	90	69	72	80,00	104,35	12	16,67	80,00	
	Investigasi	16	45	47	45	281,25	95,74	41	91,11	45	47	21	46,67	44,68	0	0,00	46,67	
	P3A	4	73	73	73	1825,00	100,00	60	82,19	73	70	51	69,86	0,00	27	52,94	69,86	
	Sub Jumlah 1	135	477	423	477	353,33	112,77	425	89,10	477	360	312	65,41	86,67	104	33,33	65,41	
2	PKPT ABT																	
	NIHIL																	
	Sub Jumlah 2	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
	Jumlah A	135	477	423	477	353,33	112,77	425	89,10	477	360	312	65,41	86,67	104	33,33	65,41	
B	KAP Generik																	
	Sub Jumlah B	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
	Total	135	477	423	477	353,33	112,77	425	89,10	477	360	312	65,41	86,67	104	33,33	65,41	

Realisasi Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU) dan Realisasi Laporan yang Terbit
Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2023

No.	Bagian/Bidang	Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU)					Laporan/Dokumen Hasil Kegiatan					% Realisasi Laporan dibandingkan Realisasi PP
		RMP		Realisasi s.d. Bulan ini	Capaian (%)		RPL		Realisasi s.d. Bulan ini	Capaian (%)		
		Tahun 2023	s.d. Bulan ini		Tahun 2023	s.d. Bulan ini	Tahun 2023	s.d. Bulan ini		Tahun 2023	s.d. Bulan ini	
1	2	3	4	5	$6=5/3*100$	$7=5/4*100$	8	9	10	$11=10/8*100$	$12=10/9*100$	$13=10/5*100$
1	TU	13	13	13	100,00	100,00	13	5	5	38,46	100,00	38,46
	Jumlah	13	13	13	100,00	100,00	13	5	5	38,46	0,00	38,46

Realisasi Hari Produktif
Realisasi s.d Trivulan II Tahun 2023

No.	Output	Rencana OH Tahun 2023	Realisasi OH s.d. Bulan ini			% Realisasi OH terhadap Rencana OH Tahun 2023	Jumlah Pegawai	Potensi OH		Capaian (%)		OH per Pegawai s.d. Bulan ini	
			Atas PKPT/ PKAU Awal	Atas PKPT/ PKAU Tambahan	Jumlah OH			Tahun 2023	s.d. Bulan ini	Tahun 2023	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6	7=6/3*100	8	9	10	11=6/9*100	12=6/10*100	13=6/8	
A	PKPT												
1	FAG.711	Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut	160	586	0	586	366,25						
		Bidang P3A	160	586									
2	FAG.U11	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah dan Desa	2401	3657	0	3657	152,31						
		Bidang IPP1	336	116									
		Bidang APD	1765	3185									
		Bidang Inv	300	356									
3	FAG.U31	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD	2668	3349	0	3349	125,52						
		Bidang AN	2668	3349									
4	FAG.028	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	4946	4240	0	4240	85,73						
		Bidang IPP1	588	834									
		Bidang IPP2	1107	1091									
		Bidang APD	1214	806									
		Bidang AN	219	0									
		Bidang Inv	1743	1494									
		Bidang P3A	75	15									
5	UAG.U21	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia	2173	1695	0	1695	78,00						
		Bidang IPP2	1848	1212									
		Bidang APD	135	243									
		Bidang AN	190	240									
6	UAG.U22	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Infrastruktur dan Konektivitas	4832	2925	0	2925	60,53						
		Bidang IPP1	2352	2123									
		Bidang IPP2	240	50									
		Bidang APD	800	588									
		Bidang AN	1440	164									
7	UAG.U23	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Ekonomi	2487	1294	0	1294	52,03						
		Bidang IPP1	240	277									
		Bidang APD	952	456									
		Bidang AN	1070	229									
		Bidang Inv	225	332									
8	UAG.U24	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	1524	0	0	0	0,00						
		Bidang Inv	1440	0									
		Bidang IPP1	84	0									
9	UAG.U27	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Daerah	540	223	0	223	41,30						
		Bidang APD	540	223									
10	UAG.U41	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Kecurangan	210	45	0	0	0,00						
		Bidang Inv	210	45									
11	UAG.U52	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	3845	1458	0	1458	37,92						
		Bidang APD	1665	781									
		Bidang P3A	2180	677									
12	UAG.U53	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	893	473	0	0	0,00						
		Bidang AN	893	473									
		Sub Jumlah 1	26679	19945	0	19427	72,82						
B	KAP Generik												
		Sub Jumlah	0	0	0	0	0,00						
		Jumlah PKPT (1+2+3)	26679	19945	0	19427	72,82						
C	PKAU		12580	12580	0	12580	100,00						
		Total PKPT + PKAU	39259	32525	0	32007	172,82						
		Perhitungan Hari Produktif				32007		128	30.336	15.168	105,51	211,02	250

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat
Realisasi Penyerapan Anggaran
Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2023

No	Program/IKK	Anggaran		Realisasi s.d. Bulan ini	% Capaian Penyerapan		
		Tahun 2023	s.d. Bulan ini		Terhadap Anggaran 2023	Terhadap Rencana s.d. Bulan ini	
		(Rp)	(Rp)		(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100	
A	Program 06						
1	FAG.711	Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut	150.000.000,00	-	70.567.330,00	47,04	-
2	FAG.U11	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah dan Desa	719.725.000,00	-	365.307.752,00	50,76	-
3	FAG.U31	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD	252.215.000,00	-	201.648.950,00	79,95	-
4	FAG.028	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	965.892.000,00	-	566.424.195,00	58,64	-
5	UAG.U21	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia	463.087.000,00	-	301.061.990,00	65,01	
6	UAG.U22	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Infrastruktur dan Konektivitas	589.444.000,00	-	294.559.996,00	49,97	
7	UAG.U23	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Ekonomi	191.866.000,00	-	136.882.640,00	71,34	
8	UAG.U24	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	136.035.000,00	-	-	-	
9	UAG.U27	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Daerah	163.485.000,00	-	79.107.814,00	48,39	
10	UAG.U41	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Kecurangan	31.500.000,00	-	19.334.449,00	61,38	
11	UAG.U52	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	3.772.599.000,00	-	826.113.944,00	21,90	
12	UAG.U53	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	102.300.000,00	-	54.155.302,00	52,94	
		Sub Jumlah Program 06	7.538.148.000,00	2.591.059.000,00	2.915.164.362,00	607,33	-
B	Program 01		35.519.466.000,00	19.675.643.000,00	20.517.371.232,00	57,76	104,28
		Total	43.057.614.000,00	22.266.702.000,00	23.432.535.594,00	54,42	105,24